

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

LA ODE TURI

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

LA ODE TURI



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis :

LA ODE TURI

ISBN : 978-634-7261-61-8

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor : Umi Safangati Hidayatun

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Akuntansi Sektor Publik* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar, konsep, dan praktik akuntansi yang berlaku di sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan dan lembaga nirlaba.

Perkembangan dunia akuntansi sektor publik yang dinamis menuntut para praktisi, akademisi, dan mahasiswa untuk terus memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjadi sumber referensi yang lengkap dan mudah dipahami, mencakup berbagai aspek mulai dari penganggaran, pengelolaan aset, pelaporan keuangan, hingga etika dan tata kelola pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia akuntansi sektor publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
A. Pengertian dan karakteristik akuntansi sektor publik	2
B. Perbedaan dengan akuntansi sektor swasta	3
C. Fungsi dan tujuan akuntansi di sektor publik	4
D. Peran akuntansi dalam tata kelola pemerintahan	5
BAB 2 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK	7
A. Jenis dan bentuk organisasi sektor publik	8
B. Karakteristik pemerintahan pusat dan daerah.....	9
C. Organisasi nirlaba dan peran sosialnya.....	10
D. Akuntabilitas dan transparansi organisasi publik	11
BAB 3 REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	12
A. Landasan hukum akuntansi sektor publik di Indonesia.....	13
B. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	14
C. Konvergensi dengan standar internasional (IPSAS).....	15
D. Prinsip penyusunan laporan keuangan pemerintah.....	16
BAB 4 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	18
A. Fungsi dan prinsip anggaran publik.....	19
B. Jenis pendekatan anggaran	20
C. Proses penyusunan anggaran pemerintah	21
D. Evaluasi dan kontrol anggaran	22
BAB 5 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH	24
A. Proses pencatatan dan dokumentasi transaksi	24
B. Pengakuan dan pengukuran transaksi	25
C. Proses penyesuaian dan penutupan.....	26
D. Penyusunan laporan keuangan.....	27
BAB 6 PENDAPATAN SEKTOR PUBLIK	29
A. Jenis pendapatan pemerintah pusat dan daerah	30

B.	Pendapatan pajak dan bukan pajak.....	31
C.	Dana transfer antar pemerintah.....	32
D.	Pengakuan dan pelaporan pendapatan.....	33
BAB 7	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH	34
A.	Klasifikasi belanja pemerintah	35
B.	Belanja operasional dan belanja modal	36
C.	Proses realisasi belanja	37
D.	Evaluasi efektivitas belanja	38
BAB 8	AKUNTANSI ASET DAN KEWAJIBAN.....	40
A.	Pengelolaan dan penilaian aset tetap	40
B.	Penyusutan dan revaluasi aset	41
C.	Pengakuan kewajiban jangka pendek dan panjang.....	42
D.	Laporan posisi keuangan sektor publik	43
BAB 9	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	45
A.	Jenis-jenis laporan keuangan	46
B.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	47
C.	Laporan Operasional dan Neraca	47
D.	Catatan atas laporan keuangan (CaLK).....	48
BAB 10	AUDIT DAN PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK.....	50
A.	Jenis dan tujuan audit sektor publik	51
B.	Peran BPK dan APIP	52
C.	Standar audit pemerintah	53
D.	Tindak lanjut hasil audit	54
BAB 11	AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	55
A.	Otonomi daerah dan keuangan daerah	55
B.	Siklus anggaran daerah.....	56
C.	Sistem pelaporan keuangan daerah	58
D.	Pengelolaan aset daerah.....	59
BAB 12	AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM (BLU).....	61
A.	Konsep dan tujuan BLU/BLUD	62
B.	Sistem akuntansi BLU.....	63
C.	Laporan keuangan BLU.....	64

D.	Evaluasi kinerja BLU	65
BAB 13	TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AKUNTANSI PUBLIK.....	67
A.	Sistem informasi keuangan pemerintah.....	68
B.	Digitalisasi laporan keuangan.....	69
C.	SIMDA dan SPAN.....	70
D.	Tantangan teknologi dalam akuntansi sektor publik	71
BAB 14	ETIKA DAN AKUNTABILITAS	72
A.	Etika profesi akuntan publik.....	73
B.	Transparansi dan akuntabilitas publik	73
C.	Tata kelola pemerintahan yang baik	74
D.	Pencegahan dan deteksi korupsi	75
BAB 15	KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK.....	77
A.	Reformasi sistem keuangan Negara	77
B.	Open government dan transparansi fiscal.....	78
C.	Sustainable budgeting dan green accounting.....	79
D.	Akuntansi sektor publik lanjutan.....	80

BAB 1

KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan kinerja bagi entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga non-profit lainnya. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang berorientasi pada laba dan kepentingan pemilik modal, akuntansi sektor publik lebih menekankan pada akuntabilitas, transparansi, serta penggunaan sumber daya publik yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana yang bersumber dari pajak, retribusi, dan penerimaan negara atau daerah lainnya. Karakteristik utama akuntansi sektor publik meliputi adanya regulasi ketat dari pemerintah, penggunaan anggaran sebagai dasar perencanaan dan pengendalian, serta pelaporan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan seperti masyarakat, legislatif, auditor, serta lembaga pengawasan lainnya agar mereka dapat menilai kinerja dan akuntabilitas entitas publik. Oleh karena itu, penerapan akuntansi sektor publik yang baik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Selain itu, akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan dan organisasi nirlaba. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi ini memungkinkan pihak manajemen dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efisiensi pelaksanaan program, menentukan prioritas alokasi anggaran, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam praktiknya, akuntansi sektor publik juga mencakup berbagai proses seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, hingga audit yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal guna memastikan integritas dan akurasi informasi yang disajikan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap transparansi serta keterbukaan informasi publik, sistem akuntansi sektor publik pun mengalami reformasi yang signifikan. Salah satu reformasi penting adalah penerapan basis akrual dalam pelaporan

keuangan pemerintah, yang memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban lebih tepat waktu serta mencerminkan posisi keuangan secara lebih akurat dibandingkan dengan basis kas yang sebelumnya digunakan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Tidak hanya itu, akuntansi sektor publik juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyimpangan keuangan. Dengan adanya sistem pencatatan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, setiap transaksi dapat ditelusuri dan diaudit secara transparan. Hal ini menciptakan iklim pengawasan yang lebih kuat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi publik, peningkatan sistem teknologi informasi, serta pengembangan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial-politik menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia dan negara-negara lain pada umumnya.

A. Pengertian dan karakteristik akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu sistem informasi keuangan yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyajikan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-profit yang menggunakan dana masyarakat. Sistem ini memiliki fungsi utama dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Pengertian ini menekankan pada fungsi akuntansi sebagai alat untuk mendukung akuntabilitas publik, bukan semata untuk menghitung laba atau rugi seperti yang berlaku pada sektor privat. Oleh karena itu, orientasi utama dari akuntansi sektor publik adalah transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik utama akuntansi sektor publik mencerminkan perbedaan esensial dengan akuntansi sektor swasta. Pertama, akuntansi sektor publik bersifat sangat regulatif, di mana proses pencatatan dan pelaporan harus mengikuti standar dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, akuntansi sektor publik menggunakan **anggaran sebagai instrumen utama** dalam

perencanaan dan pengendalian keuangan, sehingga pelaporan keuangan tidak hanya berfokus pada posisi keuangan dan kinerja, tetapi juga pada kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Ketiga, entitas sektor publik tidak berorientasi pada profit, melainkan pada penyediaan layanan kepada masyarakat. Keempat, sumber pendanaan sektor publik berasal dari pajak, hibah, dan retribusi yang bersifat wajib dan tidak langsung berkaitan dengan imbal jasa, sehingga setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kelima, pelaporan dalam akuntansi sektor publik harus menjamin keterbukaan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, legislatif, dan lembaga pengawas.

Dengan karakteristik tersebut, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan integritas agar mampu menciptakan sistem keuangan negara yang kredibel, efisien, dan berdaya guna untuk pembangunan nasional.

B. Perbedaan dengan akuntansi sektor swasta

Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki perbedaan mendasar baik dari segi tujuan, orientasi operasional, sumber dana, hingga bentuk pelaporannya. Akuntansi sektor publik berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, sementara akuntansi sektor swasta lebih berorientasi pada peningkatan laba dan nilai perusahaan bagi pemilik atau pemegang saham. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban entitas pemerintah atau lembaga publik dalam menggunakan dana masyarakat. Sebaliknya, tujuan akuntansi sektor swasta lebih kepada memberikan informasi kepada investor, kreditor, dan pihak internal perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.

Perbedaan lain terletak pada sumber pendanaan. Sektor publik memperoleh dana dari pajak, retribusi, dan hibah yang tidak memerlukan imbal balik langsung, sedangkan sektor swasta memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Oleh karena itu, dalam sektor publik, anggaran menjadi alat utama

perencanaan dan pengendalian, sedangkan dalam sektor swasta, laba menjadi indikator kinerja utama. Selain itu, sistem pelaporan keuangan pada sektor publik cenderung lebih kompleks karena harus mematuhi regulasi dan standar pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sementara sektor swasta menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk kepentingan bisnis.

Dari sisi pengguna laporan keuangan, laporan sektor publik ditujukan kepada masyarakat umum, lembaga legislatif, auditor pemerintah, dan lembaga pengawas lain, karena menyangkut penggunaan dana yang berasal dari publik. Sedangkan laporan sektor swasta lebih banyak digunakan oleh manajemen internal, investor, kreditor, dan pemegang saham untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja usaha. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan prinsip dasar akuntansi, fokus, fungsi, dan pelaksanaannya sangat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar sistem pelaporan dan pengambilan keputusan di masing-masing sektor dapat berjalan secara tepat, efektif, dan akuntabel.

C. Fungsi dan tujuan akuntansi di sektor publik

Akuntansi di sektor publik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara maupun daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik adalah sebagai alat untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis guna mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah. Melalui sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat mengelola anggaran secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan mengenai bagaimana dana publik digunakan untuk mencapai tujuan pelayanan publik.

Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Informasi tersebut mencakup aspek pendapatan, belanja, aset, kewajiban, serta surplus atau defisit anggaran. Selain itu, akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik yang

berkaitan dengan penyusunan kebijakan publik. Dalam konteks ini, informasi akuntansi menjadi dasar untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program serta kegiatan yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan, akuntansi sektor publik juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan audit secara objektif. Hal ini sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem akuntansi sektor publik harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Peran akuntansi dalam tata kelola pemerintahan

Akuntansi memainkan peran yang sangat vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut adanya sistem yang transparan, akuntabel, responsif, serta efisien dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Dalam konteks ini, akuntansi berfungsi sebagai alat utama untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangan pemerintahan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui laporan keuangan dan laporan kinerja yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang handal, para pengambil kebijakan dan publik dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana dana publik digunakan secara tepat sasaran dan efisien.

Salah satu peran kunci akuntansi dalam tata kelola pemerintahan adalah mendukung transparansi keuangan, yaitu keterbukaan informasi atas pengelolaan dana publik yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, akuntansi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, yaitu kemampuan entitas publik untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan pengeluaran kepada pihak yang memberikan mandat, seperti rakyat dan lembaga legislatif. Tanpa sistem akuntansi yang

baik, proses audit, evaluasi kinerja, dan penilaian efektivitas program pemerintah akan sulit dilakukan secara objektif.

Lebih jauh, akuntansi juga menjadi fondasi dalam pengendalian intern dan pengawasan, yang penting untuk mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan anggaran, serta pemborosan sumber daya. Informasi akuntansi yang disajikan secara akurat dan tepat waktu akan memudahkan aparatur negara, auditor, maupun lembaga pengawasan untuk memantau setiap aktivitas keuangan dan mendeteksi penyimpangan sejak dini. Dalam era digital dan desakan reformasi birokrasi, peran akuntansi bahkan semakin strategis karena menjadi bagian integral dari sistem informasi manajemen pemerintah, yang mendukung perencanaan anggaran berbasis kinerja dan pelayanan publik yang berbasis data. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berperan sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB 2

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Organisasi sektor publik merupakan entitas yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama kepentingan umum guna menyediakan pelayanan publik dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Berbeda dengan organisasi sektor swasta yang berorientasi pada pencapaian laba, organisasi sektor publik berfokus pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang berasal dari dana publik, seperti pajak, retribusi, hibah, dan sumber pendapatan negara lainnya. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan mengutamakan asas efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap kegiatannya.

Organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang khas, seperti adanya pengaruh politik yang kuat, orientasi pelayanan ketimbang keuntungan, serta keterikatan pada aturan hukum dan regulasi pemerintah. Struktur organisasi ini cenderung birokratis dan hierarkis karena harus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Contoh dari organisasi sektor publik antara lain kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, rumah sakit pemerintah, lembaga pendidikan negeri, kepolisian, dan unit-unit pelayanan publik lainnya yang didanai oleh APBN atau APBD.

Dalam konteks manajemen, organisasi sektor publik dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara profesional dan efisien meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, tekanan politik, serta ekspektasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, modernisasi sistem informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas organisasi sektor publik. Penggunaan akuntansi sektor publik juga berperan penting dalam mendukung kinerja organisasi dengan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut.

Dengan demikian, organisasi sektor publik merupakan pilar utama dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan negara. Keberhasilan organisasi ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, transparansi anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan publik.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

LA ODE TURI

